



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja, dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam satu tahun anggaran.

8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan ditetapkan.
9. Deskripsi adalah paparan yang ada pada setiap ASB dan HSPK yang menjelaskan pengertian dan gambaran singkat mengenai jenis ASB dan HSPK.
10. Pengendalian Belanja (*cost driver*) adalah faktor pemicu belanja suatu kegiatan, yang dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, durasi, dan lain-lain.
11. Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja yang merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).
12. Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) merupakan belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan sehingga semakin tinggi kegiatan yang ditetapkan, semakin besar variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:
  - a. sebagai instrumen dalam penyusunan KUA dan PPAS agar menjadi lebih objektif;
  - b. sebagai penentu kewajaran biaya dalam melaksanakan suatu kegiatan;
  - c. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
  - d. sebagai penentu anggaran berdasarkan tolok ukur kinerja yang jelas; dan
  - e. sebagai penentu besaran alokasi setiap kegiatan.

## BAB II ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

### Pasal 3

ASB dan HSPK merupakan batas tertinggi dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 116); dan
  - b. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 64); dan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 9 Mei 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

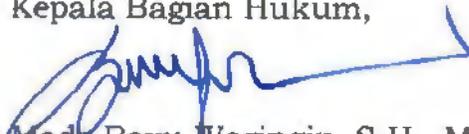
Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 9 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Made Bayu Waringin, S.H., M.H.  
NIP. 19810716 200803 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN  
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001: WORKSHOP, SOSIALISASI, BIMTEK ATAU SEJENISNYA YANG MELIBATKAN MASYARAKAT

Deskripsi:

Kegiatan Workshop merupakan pertemuan dimana pegawai SKPD pada dinas tertentu terlibat dalam diskusi dan aktivitas intensif tentang subjek atau kasus tertentu dimana persertanya melibatkan masyarakat. Sosialisasi tatap muka merupakan kegiatan memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengundang peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut. Bimtek adalah suatu kegiatan dimana peserta bisa berasal dari Pegawai di SKPD dan/atau masyarakat dimana peserta diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tim kerja, meningkatkan komunikasi dalam mewujudkan pelayanan prima, menangani keluhan masyarakat dan Teknik dalam melakukan survey kepuasan masyarakat.

- Pengendali belanja (*cost driver*):
  - Jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan
  - 1) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):  
= Rp5.245.275 per kegiatan
  - 2) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):  
= Rp316.930 per peserta x jumlah hari pelaksanaan
  - 3) Rumus perhitungan belanja total:  
Belanja tetap + belanja variabel  
= Rp5.245.275 + (Rp316.930 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 1. Batasan Alokasi Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,87%	1,96%

2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1,71%	11,00%
3	Belanja Makan dan Minum Rapat	3,16%	12,70%
4.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,69%	10,69%
5.	belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	2,51%	2,51%
6.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3,37%	3,37%
7.	Perjalanan Dinas biasa	1,21%	1,35%
8.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,45%	13,04%
9.	Belanja kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan	0,54%	0,54%
10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,72%	0,72%
12.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	1,15%	2,24%
13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,00%	6,98%
Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	20	1.389

#### ASB-002:WORKSHOP,SOSIALISASI,BIMTEK ATAU SEJENISNYA YANG MELIBATKAN PEGAWAI

##### Deskripsi:

Pelatihan kopentesi merupakan hal pokok dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap kemampuan pegawai di lingkungan SKPD Kabupaten Buleleng. Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

- Pengendali belanja (*cost driver*):  
Jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan
  - 1) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):  
= Rp1.860.464 per kegiatan
  - 2) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp193.016 per pegawai x jumlah hari pelaksanaan

3) Rumus perhitungan belanja total:

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp1.860.464 + (Rp193.016 x jumlah pegawai x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,12%	2,06%
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2,34%	10,24%
3.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	0,17%	0,35%
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,35%	13,14%
5.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,74%	9,54%
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,89%	10,62%
7.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Flm dan Pemotretan	0,79%	0,79%
8.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,13%	14,19%
9.	Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan	3,94%	3,94%
10.	Belanja Anak/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Komputer	1,06%	2,77%
11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,12%	0,12%
Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	20	1.305

#### ASB-003: PENYUSUNAN LAPORAN

##### Deskripsi:

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program yang dilaksanakan dalam kegiatan di lingkungan SKPD Kabupaten Buleleng harus selalu menyusun laporan kegiatan yang sudah direncanakan dalam program yang tercantum dalam rencana kerja anggaran di lingkungan SKPD.

- Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah laporan dan jumlah hari pengerjaan

- 1) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):  
= Rp3.903.883 per kegiatan
- 2) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):  
= Rp18.938 per laporan x jumlah hari pelaksanaan
- 3) Rumus perhitungan belanja total:  
Belanja tetap + belanja variabel  
= Rp3.903.883 + (Rp18.938 x jumlah laporan x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	6,94%	21,89%
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	0,61%	1,07%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,17%	45,22%
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,66%	4,51%
5.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,77%	8,51%
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,61%	6,12%
7.	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan	25,06%	25,06%
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,82%	10,61%
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,44%	0,44%
Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah laporan x jumlah hari pelaksanaan	1	8.643

ASB-004: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN (RENCANA STRATEGIS, RENCANA KERJA DAN RKA)

Deskripsi:

Penyelenggaraan kegiatan tahunan rutin yang membicarakan atau menyusun anggaran pendapatan dan anggaran belanja untuk pemerintah daerah atau penyusunan rencana strategis untuk masing-masing SKPD.

- Pengendali belanja (*cost driver*):  
Jumlah tim penyusun dan jumlah hari pelaksanaan
  - 1) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):  
= Rp18.769.078 per kegiatan
  - 2) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):  
= Rp885.792 tim penyusun x jumlah hari pelaksanaan
  - 3) Rumus perhitungan belanja total:

Belanja tetap + belanja variabel  
 = Rp18.769.078 + (Rp885.792 x jumlah tim penyusun x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 4. Batasan Alokasi Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2,22%	20,69%
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	0,05%	0,08%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,99%	8,89%
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,84%	9,11%
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,93%	1,65%
6.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,12%	3,27%
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,43%	2,56%
8.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,87%	1,45%
9.	Honorarium Tim Anggaran Pelaksanaan Daerah	47,21%	47,21%
10.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,48%	2,48%
11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,38%	1,37%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah tim penyusun x jumlah hari pelaksanaan	5	662

#### ASB-005: MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

##### Deskripsi:

Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di tingkat kecamatan untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan.

##### ▪ Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan

1) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp942.058 per kegiatan

2) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp111.865 per peserta x jumlah hari pelaksanaan

3) Rumus perhitungan belanja total:

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp942.058+ (Rp111.865 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 5. Batasan Alokasi Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,17%	7,17%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,11%	3,11%
3.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2,80%	3,20%
4.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	0,06%	0,06%
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,22%	20,62%
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,65%	1,65%
7.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9,19%	13,51%
8.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6,75%	10,38%
9.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6,23%	8,31%
10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,18%	2,18%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	42	442

## ASB-006: KEGIATAN MONITORING ,EVALUASI DAN PEMBINAAN

## Deskripsi:

Pengumpulan data atau informasi dalam monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan program yang dipantau. Sasaran monitoring adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup input, proses, output dan outcome. Pihak yang melakukan monitoring adalah pengelola program dan/atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memantau pelaksanaan program. Hasil monitoring digunakan untuk meluruskan atau memperbaiki program. Perbaikan program itu sendiri dilakukan dalam kegiatan supervisi, bukan dalam kegiatan monitoring. Evaluasi program merupakan salah satu fungsi dari manajemen program, evaluasi program dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi program harus dan dapat diselenggarakan secara terus menerus, berkala, dan atau sewaktu-waktu. Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan pada saat sebelum, sedang, atau setelah program dilaksanakan, evaluasi merupakan kegiatan yang

bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan. Evaluasi adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen, evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Setelah monitoring dan evaluasi akan dilanjutkan dengan pembinaan secara konsisten dari hasil monitoring dan evaluasi untuk diperbaiki.

- Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta yang melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan serta jumlah hari pelaksanaan

1) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp24.052.857 per kegiatan

2) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp775.347 per peserta monitoring, evaluasi dan pembinaan x per hari pelaksanaan

3) Rumus perhitungan belanja total:

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp24.052.857 + (Rp775.347 x jumlah peserta monitoring, evaluasi dan pembinaan x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	0,61%	1,69%
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	0.11%	0,44%
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,62%	4,27%
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,65%	17,36%
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,07%	7,99%
6.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,91%	1,59%
7.	Honorarium Narasumber atau	9,83%	19,36%

	Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,35%	0,48%
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendra Mata	1,34%	1,34%
10.	Belanja Jasa Juri Perlombaan /Pertandingan	1,20%	1,20%
11.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film,dan Pemotretan	0,16%	0,16%
12.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,80%	0,80%
	Jumlah	100,00%	

- Variable komponen dalam ASB ini tidak termasuk dalam perhitungan dalam pemberian hadiah.

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah peserta monitoring, evaluasi dan pembinaan x jumlah hari pelaksanaan	5	775

#### 4.7. ASB-007: PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

##### Deskripsi:

Kegiatan pengumpulan data dan informasi merupakan kegiatan dalam rangka melakukan pencarian data dan informasi pada masing-masing kegiatan yang ada di SKPD Kabupaten Buleleng untuk mendukung kegiatan yang memerlukan data dan informasi.

- Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah tim penyusun yang melakukan pengumpulan data dan informasi serta jumlah hari pelaksanaan

1. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp10.127.644 perkegiatan

2. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.203.821 tim penyusun yang melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi x per hari pelaksanaan

3. Rumus perhitungan belanja total:

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp10.127.644 + (Rp1.203.821 x jumlah tim penyusun yang melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 7. Batasan Alokasi Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	0,91%	3,40%
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	0,13%	0,23%

3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,11%	0,11%
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,46%	3,04%
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,57%	3,83%
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,26%	8,99%
7.	Perjalanan Dinas biasa	5,13%	5,63%
8.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2,59%	4,02%
9.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4,25%	7,54%
10.	Honorarium Tim pelaksana kegiatan	31,90%	40,87%
11.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2,97%	2,97%
12.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,47%	0,78%
13.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,33%	0,33%
Jumlah		100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah peserta yang melakukan pengumpulan data dan informasi x jumlah hari pelaksanaan	10	364

#### 4.8. ASB-008: PENINGKATAN KOMPETENSI

##### Deskripsi:

Kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, aktif dalam mengikuti kegiatan pada disiplin keilmuan terapan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan mengikuti pelatihan.

- Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah personil peserta peningkatan kompetensi

1) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp5.869.546 per kegiatan

2) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.842.192 per personil peserta peningkatan kompetensi

3) Rumus perhitungan belanja total:

Belanja tetap + belanja variabel

= Rp5.869.546 + (Rp1.842.192 x jumlah personil peningkatan kompetensi)

Tabel 8. Batasan Alokasi Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,25%	1,28%
2.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,35%	5,39%
3.	Belanja Bimbingan Teknis	9,37%	13,38%
4.	Belanja Kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	5,35%	5,35%
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,19%	4,27%
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,73%	2,82%
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5,35%	5,35%
8.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2,72%	4,03%
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,79%	1,42%
10.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	0,35%	0,54%
11.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,41%	2,41%
12.	Belanja Bahan Pelatihan	3,34%	3,34%
	Jumlah	100,00%	

Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah personil peserta peningkatan kompetensi	1	200

#### 4.9 ASB-009 : PEMELIHARAAN RINGAN

##### Deskripsi:

Kegiatan pemeliharaan ringan merupakan kegiatan untuk melakukan pemeliharaan berupa mesin, printer, computer, CCTV, pompa air, running tes, personal komputer, kulkas, kendaraan dinas pejabat, sofa, meja kerja, lemari, kursi kerja, mesin cuci, dispenser, kompor gas, TV, jaringan, peralatan dan jaringan PABX, jaringan perangkat internet pada tahun anggaran tertentu di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

- Pengendali belanja (*cost driver*):  
 Jumlah unit yang ditangani
  - 1) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):  
 = Rp. 102.834.421 jumlah peralatan
  - 2) Rumus perhitungan belanja total:  
 Belanja variabel  
 = Rp.102.843.421 x Jumlah unit

Tabel 9. Batasan Alokasi Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,42%	0,47%
2.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1,16%	1,39%
3.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,93%	0,94%
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Pendingin	1,08%	1,47%
5.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	0,79%	0,79%
6.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,31%	0,31%
7.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24,21%	24,21%
8.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel	0,70%	0,70%
9.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat pembersih	0,46%	0,46%
10.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat dapur	0,25%	0,25%
11.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah tangga Lainnya	1,39%	1,39%
12.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan pemancar- Peralatan Studio	1,70%	1,70%
13.	Belanja Pemeliharaan Jaringan- jaringan Transmisi	2,31%	2,31%
14.	Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor roda dua	2,45%	2,45%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Optimal		
Pengendali Belanja	Minimum	Maksimum
Jumlah rentang unit dan peserta	39 unit	390 unit

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 27 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA DAN  
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

HSPK 001.PERENCANAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi pengadaan konstruksi fisik merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan sebagainya.

▪ Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai konstruksi

1) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

Fixed Cost (Rp)	Nilai Konstruksi (Rp)
49.778.862,92	Nilai konstruksi 0 s.d. 200.000.000
27.871.822,04	Nilai kontruksi diatas 200.000.000

2) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,82 x Nilai Kontruksi Rp0 s.d Rp200.000.000
1.01 x Nilai Kontruksi di atas Rp200.000.000

3) Rumus perhitungan belanja total: Belanja tetap + belanja variabel

No.	Objek Pajak	Rata-Rata	Maksimum
1.	Belanja Bahan Habis Pakai	10,10%	63,53%
2.	Belanja Cetak dan Pengadaan	4,89%	46,15%
3.	Belanja Makanan dan Minuman	0,72%	11,30%
4.	Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.49%	36,49%
	Jumlah	100%	

Nilai keseluruhan pagu belanja (Y) setelah dikurangi nilai kontruksi merupakan belanja administrasi, yang didistribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana disajikan dalam table dibawah ini.

No	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 0 - 250 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 0 - 250 juta	Paket	0,159368
2.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 250 - 500 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 250 - 500 juta	Paket	0,132264
3.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan	biaya konstruksi fisik bangunan gedung	Paket	0,109032

	Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 500 Juta - 1 Miliar	negara klasifikasi sederhana 500 juta - 1 miliar		
4.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 1 - 2,5 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 1 - 2,5 miliar	Paket	0,090024
5.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 2,5 - 5 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 2,5 - 5 miliar	Paket	0,081664
6.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 5 - 10 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 5 - 10 miliar	Paket	0,068728
7.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 10 - 25 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 10 - 25 miliar	Paket	0,060104
8.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 25 - 50 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 25 - 50 miliar	Paket	0,042944
9.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 50 - 100 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 50 - 100 miliar	Paket	0,028952
10.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 100 - 250 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 100 - 250 miliar	Paket	0,018304
11.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 250 - 500 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 250 - 500 miliar	Paket	0,015840
12.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana > 500 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana > 500 miliar	Paket	0,015840
13.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 0 - 250 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 0 - 250 juta	Paket	0,174240
14.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 250 - 500 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 250 - 500 juta	Paket	0,146168
15.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 500 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 500 juta - 1	Paket	0,122936

	- 1 Miliar	miliar		
16.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 1 - 2,5 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 1 - 2,5 miliar	Paket	0,103928
17.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 2,5 - 5 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 2,5 - 5 miliar	Paket	0,095304
18.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 5 - 10 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 5 - 10 miliar	Paket	0,082104
19.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 10 - 25 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 10 - 25 miliar	Paket	0,072864
20.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 25 - 50 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 25 - 50 miliar	Paket	0,053152
21.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 50 - 100 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 50 - 100 miliar	Paket	0,035376
22.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 100 - 250 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 100 - 250 miliar	Paket	0,022440
23.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 250 - 500 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 250 - 500 miliar	Paket	0,020416
24.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana > 500 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana > 500 miliar	Paket	0,020416
25.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus 0 - 250 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi khusus 0 - 250 juta	Paket	0,188760
26.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus 250 - 500 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi khusus 250 - 500 juta	Paket	0,158752
27.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus 500 Juta - 1 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi khusus 500 juta - 1 miliar	Paket	0,133408
28.	Perencanaan Teknis	biaya konstruksi fisik	Paket	

	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus 1 - 2,5 Miliar	bangunan gedung negara klasifikasi khusus 1 - 2,5 miliar		0,113256
29.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus 2,5 - 5 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi khusus 2,5 - 5 miliar	Paket	0,104720
30.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus 5 - 10 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi khusus 5 - 10 miliar	Paket	0,091080
31.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus 10 - 25 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi khusus 10 - 25 miliar	Paket	0,082016
32.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus 25 - 50 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi khusus 25 - 50 miliar	Paket	0,060720
33.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus 50 - 100 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi khusus 50 - 100 miliar	Paket	0,040480
34.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus 100 - 250 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi khusus 100 - 250 miliar	Paket	0,026048
35.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus 250 - 500 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi khusus 250 - 500 miliar	Paket	0,024200
36.	Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus > 500 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi khusus > 500 miliar	Paket	0,024200
37.	Penyusunan Master Plan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana	biaya langsung personil, biaya langsung non personil	Paket	50.000,00 0,00
38.	Penyusunan Master Plan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana	biaya langsung personil, biaya langsung non personil	Paket	100,000,0 00,00
39.	Penyusunan Master Plan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus	biaya langsung personil, biaya langsung non personil	Paket	200,000,0 00,00
40.	Penyusunan Rancangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	biaya langsung personil, biaya langsung non personil	Paket	200,000,0 00,00
41.	Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Negara	biaya langsung personil, biaya langsung non personil	Paket	100,000,0 00,00

## HSPK 002. PEMBANGUNAN GEDUNG

### Deskripsi:

Merupakan pembangunan Gedung di lingkungan Kabupaten Buleleng dengan dimensi pengukuran harga satuan pembangunan per M2 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1.	Pembangunan bangunan Gedung negara dengan fungsi Gedung kantor lantai 1(Full Finish)	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 1; nilai komponen pekerjaan standar 100% (sudah finishing)	M2	5,430,000,00
2.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 1 (Non Finish)	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 1; nilai komponen pekerjaan standar 60% (belum finishing)	M2	3.258.000,00
3.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 1 (Finishing)	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 1; nilai komponen pekerjaan standar 40% (hanya finishing)	M2	2.172.000,00
4.	Rehabilitasi/Renovasi Berat Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 1	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 1; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 45% - 65%	M2	3.529.500,00
5.	Rehabilitasi/Renovasi Sedang Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 1	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 1; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 30% - 45%	M2	2.443.500,00
6.	Rehabilitasi/Renovasi Ringan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 1	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 1; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 0% - 30%	M2	1.629.000,00
7.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 2 (Full Finish)	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 2; nilai komponen pekerjaan standar 100% (sudah finishing)	M2	5.918.700,00
8.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 2 (Non Finish)	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 2; nilai komponen pekerjaan standar 60% (belum finishing)	M2	3.551.220,00
9.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 2 (Finishing)	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 2; nilai komponen pekerjaan standar 40% (hanya finishing)	M2	2.367.480,00
10.	Rehabilitasi/Renovasi Berat Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 2	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan	M2	3.847.155,00

		standar 45% - 65%		
11.	Rehabilitasi/Renovasi Sedang Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 2	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 30% - 45%	M2	2.663.415,00
12.	Rehabilitasi/Renovasi Ringan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 2	klasifikasi sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 0% - 30%	M2	1.775.610,00
13.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 3 (Full Finish)	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 3; nilai komponen pekerjaan standar 100% (sudah finishing)	M2	7.705.600,00
14.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 3 (Non Finish)	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 3; nilai komponen pekerjaan standar 60% (belum finishing)	M2	4.623.360,00
15.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 3 (Finishing)	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 3; nilai komponen pekerjaan standar 40% (hanya finishing)	M2	3.082.240,00
16.	Rehabilitasi/Renovasi Berat Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 3	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 3; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 45% - 65%	M2	5.008.640,00
17.	Rehabilitasi/Renovasi Sedang Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 3	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 3; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 30% - 45%	M2	3.467.520,00
18.	Rehabilitasi/Renovasi Ringan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 3	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 3; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 0% - 30%	M2	2.311.680,00
19.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 4 (Full Finish)	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 4; nilai komponen pekerjaan standar 100% (sudah finishing)	M2	7.808.800,00
20.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 4 (Non Finish)	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 4; nilai komponen pekerjaan standar 60% (belum finishing)	M2	4.685.280,00
21.	Pembangunan Bangunan Gedung	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor;	M2	3.123.520,00

	Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 4 (Finishing)	jumlah lantai 4; nilai komponen pekerjaan standar 40% (hanya finishing)		
22.	Rehabilitasi/Renovasi Berat Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 4	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 4; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 45% - 65%	M2	5.075.720,00
23.	Rehabilitasi/Renovasi Sedang Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 4	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 4; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 30% - 45%	M2	3.513.960,00
24.	Rehabilitasi/Renovasi Ringan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai 4	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; jumlah lantai 4; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 0% - 30%	M2	2.342.640,00
25.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Kantor Lantai Basement 1 Lapis	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung kantor; lantai basement jumlah 1 lapis	M2	8.235.360,00
26.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Gudang	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan gudang; komponen pekerjaan standar	M2	4.887.000,00
27.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Bengkel/Hanggar	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung untuk bengkel; komponen pekerjaan standar	M2	6.880.000,00
28.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang ICU/ICCU/IGD/CMU/NICU	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang ICU/ICCU/IGD/CMU/NICU; komponen pekerjaan standar	M2	10,320,000,00
29.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang Operasi	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang operasi; komponen pekerjaan standar	M2	13,760,000,00
30.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang Radiologi	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang radiologi; komponen pekerjaan standar	M2	8.600.000,00
31.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang Laboratorium	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang laboratorium; komponen pekerjaan standar	M2	7.568.000,00
32.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang Gawat	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang gawat darurat; komponen pekerjaan standar	M2	7.568.000,00

	Darurat			
33.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang Kebidanan dan Kandungan	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang kebidanan dan kandungan; komponen pekerjaan standar	M2	8.256.000,00
34.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang Rawat Inap	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang rawat inap; komponen pekerjaan standar	M2	7.568.000,00
35.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang Rawat Jalan	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang rawat jalan; komponen pekerjaan standar	M2	7.568.000,00
36.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Oseanarium/Observatorium	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan oseanarium/observatorium; komponen pekerjaan standar	M2	10,32,000,00
37.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Tempat Ibadah	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung tempat ibadah; komponen pekerjaan standar	M2	8.256.000,00
38.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Tempat Pertemuan	klasifikasi sederhana; fungsi gedung tempat pertemuan; komponen pekerjaan standar	M2	5.430.000,00
39.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Tempat Pendidikan	klasifikasi sederhana; fungsi gedung tempat pendidikan; komponen pekerjaan standar	M2	4.887.000,00
40.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Tempat Olahraga	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung tempat olahraga; komponen pekerjaan standar	M2	8.256.000,00
41.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Pertokoan	klasifikasi sederhana; fungsi gedung pertokoan; komponen pekerjaan standar	M2	5.430.000,00
42.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Pasar	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan pasar; komponen pekerjaan standar	M2	6.880.000,00
43.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung untuk Pos Jaga	klasifikasi sederhana; fungsi gedung untuk pos jaga; komponen pekerjaan standar	M2	4.344.000,00
44.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Garasi/Pool	klasifikasi sederhana; fungsi gedung untuk garasi/pool; komponen pekerjaan standar	M2	3.258.000,00
45.	Pembangunan Bangunan Gedung	klasifikasi sederhana; fungsi gedung pemotong hewan;	M2	4.887.000,00

	Negara Dengan Fungsi Gedung Pemotong Hewan	komponen pekerjaan standar		
46.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Perpustakaan	klasifikasi sederhana; fungsi gedung perpustakaan; komponen pekerjaan standar	M2	4.887.000,00
47.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Museum	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung museum; komponen pekerjaan standar	M2	8.256.000,00
48.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung terminal/pelabuhan/bandara; komponen pekerjaan standar	M2	10,320,000,00
49.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Pengujian Kelaikan	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan pengujian kelaikan; komponen pekerjaan standar	M2	6.880.000,00
50.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Lembaga Masyarakat	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung lembaga masyarakat; komponen pekerjaan standar	M2	7.568.000,00
51.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Rumah Tahanan	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan rumah tahanan; komponen pekerjaan standar	M2	7.568.000,00
52.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Krematorium	klasifikasi sederhana; fungsi gedung krematorium; komponen pekerjaan standar	M2	4.887.000,00
53.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan pembakaran bangkai hewan; komponen pekerjaan standar	M2	4.887.000,00
54.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang Sidang	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang sidang; komponen pekerjaan standar	M2	10,320,000,00
55.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Terbuka	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan terbuka; komponen pekerjaan standar	M2	3.801.000,00
56.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Penampung Sekam	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan penampung sekam; komponen pekerjaan standar	M2	4.887.000,00
57.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan tempat pelelangan ikan; komponen pekerjaan standar	M2	5.430.000,00

58.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Industri	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan industri; komponen pekerjaan standar	M2	10,320,000,00
59.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Peternakan/Perikanan	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan bangunan peternakan/perikanan; komponen pekerjaan standar	M2	4.887.000,00
60.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang Power House	Klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang power house; komponen pekerjaan standar	M2	8.600.000,00
61.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang Dapur/Laundri	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang dapur/laundri; komponen pekerjaan standar	M2	7.568.000,00
62.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan/Ruang Selasar Luar Beratap/Teras	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan/ruang selasar luar beratap/teras; komponen pekerjaan standar	M2	3.440.000,00
63.	Restorasi Pratama Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah/Nasional	pemugaran/pelestarian bangunan gedung cagar budaya; kondisi rusak berat; fungsi bangunan tetap atau berubah; arsitektur bangunan tetap; struktur dan utilitas bangunan dapat berubah	M2	4.472.000,00
64.	Restorasi Madya Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah/Nasional	pemugaran/pelestarian bangunan gedung cagar budaya; kondisi rusak sedang; fungsi bangunan tetap atau berubah; arsitektur bangunan tetap; struktur dan utilitas bangunan dapat berubah	M2	3.096.000,00
65.	Restorasi Utama Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah/Nasional	pemugaran/pelestarian bangunan gedung cagar budaya; kondisi rusak ringan; fungsi bangunan tetap atau berubah; arsitektur bangunan tetap; struktur dan utilitas bangunan dapat berubah	M2	2.064.000,00
66.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Peralatan Geofisika/Stasiun Cuaca	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan peralatan geofisika/stasiun cuaca; komponen pekerjaan standar	M2	5.973.000,00
67.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan WC/Toilet Umum	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan wc/toilet umum; komponen pekerjaan standar	M2	5.973.000,00
68.	Pembangunan	klasifikasi sederhana; fungsi	M2	3.258.000,00

	Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Parkir	bangunan parkir; komponen pekerjaan standar		
69.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Gedung Pabrik	klasifikasi tidak sederhana; fungsi gedung pabrik; komponen pekerjaan standar	M2	10,320,000,00
70.	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dengan Fungsi Bangunan Stasiun Bus	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan stasiun bus; komponen pekerjaan standar	M2	8.256.000,00
71.	Pembangunan Taman (Hardscaping)	paving stone, batu alam, kerikil, kayu, dan material keras lainnya sebagai latar hias buatan	M2	2.172.000,00
72.	Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara (Full Finish)	tinggi 1,50 m' dengan komponen pekerjaan standar 100% (sudah finishing)	M1	3.030.000,00
73.	Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara (Non Finish)	tinggi 1,50 m' dengan komponen pekerjaan standar 75% (belum finishing)	M1	2.272.500,00
74.	Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara (Finishing)	tinggi 1,50 m' dengan komponen pekerjaan standar 25% (hanya finishing)	M1	757.500,00
75.	Pembangunan Pagar Belakang Gedung Negara (Full Finish)	tinggi 3,00 m' dengan komponen pekerjaan standar 100% (sudah finishing)	M1	2.630.000,00
76.	Pembangunan Pagar Belakang Gedung Negara (Non Finish)	tinggi 3,00 m' dengan komponen pekerjaan standar 75% (belum finishing)	M1	1.972.500,00
77.	Pembangunan Pagar Belakang Gedung Negara (Finishing)	tinggi 3,00 m' dengan komponen pekerjaan standar 25% (hanya finishing)	M1	657.500,00
78.	Pembangunan Pagar Samping Gedung Negara (Full Finish)	tinggi 2,00 m' dengan komponen pekerjaan standar 100% (sudah finishing)	M1	2.510.000,00
79.	Pembangunan Pagar Samping Gedung Negara (Non Finish)	tinggi 2,00 m' dengan komponen pekerjaan standar 75% (belum finishing)	M1	1.882.500,00
80.	Pembangunan Pagar Samping Gedung Negara (Finishing)	tinggi 2,00 m' dengan komponen pekerjaan standar 25% (hanya finishing)	M1	627.500,00
81.	Pekerjaan Alat Pengkondisian Udara Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 20% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	1.086.000,00
82.	Pekerjaan Alat Pengkondisian Udara Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 20% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	1.376.000,00

83.	Pekerjaan Lift, Eskalator, dan/atau Lantai Berjalan (Moving Walk) Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 12% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	651.600,00
84.	Pekerjaan Lift, Eskalator, dan/atau Lantai Berjalan (Moving Walk) Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 12% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	825.600,00
85.	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 6% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	325.800,00
86.	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 6% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	412.800,00
87.	Pekerjaan Telepon dan Perangkat Penyambungan Komunikasi Telepon (Private Automatic Branch Exchange atau PABX) Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 6% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	325.800,00
88.	Pekerjaan Telepon dan Perangkat Penyambungan Komunikasi Telepon (Private Automatic Branch Exchange atau PABX) Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 6% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	412.800,00
89.	Pekerjaan Instalasi Informasi dan Teknologi Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 11% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	597.300,00
90.	Pekerjaan Instalasi Informasi dan Teknologi Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 11% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	756.800,00
91.	Pekerjaan Elektrikal (termasuk Genset) Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 12% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	651.600,00
92.	Pekerjaan Elektrikal (termasuk Genset) Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 12% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	825.600,00
93.	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 12% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	651.600,00
94.	Pekerjaan Sistem	klasifikasi tidak sederhana;	M2	825.600,00

	Proteksi Kebakaran Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	nilai komponen pekerjaan non standar 12% per-m2 luas bangunan/ruang		
95.	Pekerjaan Penangkal Petir Khusus Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 5% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	271.500,00
96.	Pekerjaan Penangkal Petir Khusus Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 5% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	344.000,00
97.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 4% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	217.200,00
98.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 4% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	275.200,00
99.	Pekerjaan Interior (termasuk Furniture) Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 25% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	1.357.500,00
100.	Pekerjaan Interior (termasuk Furniture) Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 25% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	1.720.000,00
101.	Pekerjaan Instalasi Gas Pembakaran Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 2% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	108.600,00
102.	Pekerjaan Instalasi Gas Pembakaran Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 2% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	137.600,00
103.	Pekerjaan Instalasi Gas Medis Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 4% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	217.200,00
104.	Pekerjaan Instalasi Gas Medis Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 4% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	275.200,00
105.	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 3% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	162.900,00
106.	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 3% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	206.400,00
107.	Pekerjaan Fondasi Dalam Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 12% per-m2 luas	M2	651.600,00

		bangunan/ruang		
108.	Pekerjaan Fondasi Dalam Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 12% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	825.600,00
109.	Pekerjaan Fasilitas Penyandang Difabel atau Berkebutuhan Khusus Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 8% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	434.400,00
110.	Pekerjaan Fasilitas Penyandang Difabel atau Berkebutuhan Khusus Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 8% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	550.400,00
111.	Pekerjaan Sarana atau Prasarana Lingkungan Bangunan/Ruang Klasifikasi Sederhana	klasifikasi sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 8% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	434.400,00
112.	Pekerjaan Sarana atau Prasarana Lingkungan Bangunan/Ruang Klasifikasi Tidak Sederhana	klasifikasi tidak sederhana; nilai komponen pekerjaan non standar 8% per-m2 luas bangunan/ruang	M2	550.400,00
113.	Pembangunan Rumah Negara Tipe A (bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan)	standar luas bangunan 250 m2 dengan luas tanah 600 m2, nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	6.600.000,00
114.	Rehabilitasi/Renovasi Berat Rumah Negara Tipe A (bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan)	standar luas bangunan 250 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 45% - 65%	M2	4.290.000,00
115.	Rehabilitasi/Renovasi Sedang Rumah Negara Tipe A (bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan)	standar luas bangunan 250 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 30% - 45%	M2	2.970.000,00
116.	Rehabilitasi/Renovasi Ringan Rumah Negara Tipe A (bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara)	standar luas bangunan 250 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 0% - 30%	M2	1.980.000,00

	atau Dewan)			
117.	Pembangunan Rumah Negara Tipe B (bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e)	standar luas bangunan 120 m2 dengan luas tanah 350 m2; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	6.510.000,00
118.	Rehabilitasi/Renovasi Berat Rumah Negara Tipe B (bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e)	standar luas bangunan 120 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 45% - 65%	M2	4.231.500,00
119.	Rehabilitasi/Renovasi Sedang Rumah Negara Tipe B (bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e)	standar luas bangunan 120 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 30% - 45%	M2	2.929.500,00
120.	Rehabilitasi/Renovasi Ringan Rumah Negara Tipe B (bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e)	standar luas bangunan 120 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 0% - 30%	M2	1.953.000,00
121.	Pembangunan Rumah Negara Tipe C (bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c)	standar luas bangunan 70 m2 dengan luas tanah 200 m2; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	5.810.000,00
122.	Rehabilitasi/Renovasi Berat Rumah Negara Tipe C (bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c)	standar luas bangunan 70 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 45% - 65%	M2	3.776.500,00
123.	Rehabilitasi/Renovasi Sedang Rumah Negara Tipe C (bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c)	standar luas bangunan 70 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 30% - 45%	M2	2.614.500,00
124.	Rehabilitasi/Renovasi Ringan Rumah Negara Tipe C (bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala	standar luas bangunan 70 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 0% - 30%	M2	1.743.000,00

	Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c)			
125.	Pembangunan Rumah Negara Tipe D (bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III)	standar luas bangunan 50 m2 dengan luas tanah 120 m2; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	5.810.000,00
126.	Rehabilitasi/Renovasi Berat Rumah Negara Tipe D (bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III)	standar luas bangunan 50 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 45% - 65%	M2	3.776.500,00
127.	Rehabilitasi/Renovasi Sedang Rumah Negara Tipe D (bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III)	standar luas bangunan 50 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 30% - 45%	M2	2.614.500,00
128.	Rehabilitasi/Renovasi Ringan Rumah Negara Tipe D (bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III)	standar luas bangunan 50 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 0% - 30%	M2	1.743.000,00
129.	Pembangunan Rumah Negara Tipe E (bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II)	standar luas bangunan 36 m2 dengan luas tanah 100 m2; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	5.810.000,00
130.	Rehabilitasi/Renovasi Berat Rumah Negara Tipe E (bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II)	standar luas bangunan 36 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 45% - 65%	M2	3.776.500,00
131.	Rehabilitasi/Renovasi Sedang Rumah Negara Tipe E (bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II)	standar luas bangunan 36 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 30% - 45%	M2	2.614.500,00
132.	Rehabilitasi/Renovasi Ringan Rumah Negara Tipe E (bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II)	standar luas bangunan 36 m2; nilai tingkat kerusakan komponen pekerjaan standar 0% - 30%	M2	1.743.000,00
133.	Pembangunan Mess/Wisma/Bungalow /Tempat Peristirahatan	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan mess/wisma/bungalow; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	6.391.000,00

134.	Pembangunan Asrama	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan asrama; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	6.391.000,00
135.	Pembangunan Hotel	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan hotel; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	9.900.000,00
136.	Pembangunan Motel	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan motel; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	7.920.000,00
137.	Pembangunan Flat/Rumah Susun	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan flat/rumah susun; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	7.920.000,00
138.	Pembangunan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan rumah negara; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	5.810.000,00
139.	Pembangunan Panti Asuhan	klasifikasi sederhana; fungsi bangunan panti asuhan; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	6.391.000,00
140.	Pembangunan Apartemen	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan apartemen; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	7.920.000,00
141.	Pembangunan Rumah Tidak Bersusun	klasifikasi tidak sederhana; fungsi bangunan rumah tidak bersusun; nilai komponen pekerjaan standar 100%	M2	6.600.000,00
142.	Pembangunan Pagar Depan Rumah Negara	tinggi 1,50 m'	M1	2.810.000,00
143.	Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara	tinggi 2,50 m'	M1	1.780.000,00
144.	Pembangunan Pagar Samping Rumah Negara	tinggi 2,00 m'	M1	1.640.000,00

## HSPK 003. PERKERASAN JALAN

### Deskripsi:

Merupakan pembangunan, penggantian, rehabilitasi jalan yang ada di lingkungan Kabupaten Buleleng dengan dimensi pengukuran harga satuan pembangunan per M2 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1.	Peningkatan Jalan dengan Tonase 8 Ton Lebar 3,0 Meter	Campuran Aspal Beton 1 Lapis, Agregat tebal = 15 cm, Beton Bahu fc"15 Mpa, Bangunan Pelengkap dan Jembatan	KM	1.500.000.000
2.	Rehabilitasi Jalan dengan Tonase 8 Ton Lebar 3,0 Meter	Campuran Aspal Beton 1 Lapis, Beton Bahu fc"15 Mpa dan Bangunan Pelengkap	KM	1.300.000.000
3.	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan tipe 1	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	M3	900.000
4.	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan tipe 2	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah dengan Struktur Beton	M3	1.200.000
5.	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan tipe 3	Gorong-gorong Pasangan Batu Type 100	M	9.700.000
6.	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan tipe 4	Pasangan Batu dengan Mortar type 50 (Saluran Drainase)	M	530.000
7.	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan tipe 5	Pasangan Batu dengan Mortar type 60 (Saluran Drainase)	M	600.000
8.	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan tipe 6	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	M	6.600.000
9.	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan tipe 7	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm	M	8.200.000
10.	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan tipe 8	Gorong-gorong dengan Pasangan Batu, Dinding Penahan Tanah, Pasangan Batu dengan Mortar, Lapis Penetrasi Macadam, Beton fc"10 Mpa	M	2.500.000
11.	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan tipe 9	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, Dinding Penahan Tanah, Pasangan Batu dengan Mortar, Lapis Penetrasi Macadam, Beton fc"10 Mpa	M	2.500.000
12.	Rehabilitasi Jalan dengan Perkerasan Lapis Penetrasi Macadam	Aspal Lapen tebal 5 cm	M2	230.000

13.	Pembangunan/Penggantian Jembatan Kls B tipe 1	Lebar Perkerasan 6 meter, Trotoar Kiri = 0,5 m Kanan = 0,5 m Balok Konvensional,	M	260.000.000
14.	Penggantian Lantai Jembatan	Aspal Lapen tebal 5 cm	M2	6.000.000

## HSPK 004 PENGAWASAN PEMBANGUNAN KONTRUKSI

Deskripsi :

Merupakan pekerjaan pengawasan kontruksi secara keseluruhan dari serangkaian perencanaan, pelaksanaan, secara pelaporan yang meliputi : Tata letak arsitektur, sipil, mekanik, listrik, dan lingkungan dari masing-masing pekerjaan beserta assesoris untuk mewujudkan sebuah bangunan.

Adapun jenis kegiatannya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 0 - 250 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana a 0 - 250 juta	Paket	0,093192
2	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 250 - 500 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana a 250 - 500 juta	Paket	0,080520
3	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 500 Juta - 1 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana a 500 juta - 1 miliar	Paket	0,067936
4	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 1 - 2,5 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana a 1 - 2,5 miliar	Paket	0,056936
5	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 2,5 - 5 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana a 2,5 - 5 miliar	Paket	0,047608

6	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 5 - 10 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 5 - 10 miliar	Paket	0,039512
7	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 10 - 25 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 10 - 25 miliar	Paket	0,035464
8	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 25 - 50 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 25 - 50 miliar	Paket	0,031944
9	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 50 - 100 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 50 - 100 miliar	Paket	0,021824
10	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 100 - 250 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 100 - 250 miliar	Paket	0,013992
11	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana 250 - 500 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana 250 - 500 miliar	Paket	0,013112
12	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana > 500 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi sederhana > 500 miliar	Paket	0,013112

13	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 0 - 250 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 0 - 250 juta	Paket	0,185504
14	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 250 - 500 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 250 - 500 juta	Paket	0,160160
15	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 500 Juta - 1 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 500 juta - 1 miliar	Paket	0,135256
16	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 1 - 2,5 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 1 - 2,5 miliar	Paket	0,113344
17	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 2,5 - 5 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 2,5 - 5 miliar	Paket	0,094688
18	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 5 - 10 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 5 - 10 miliar	Paket	0,067056
19	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 10 - 25 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 10 - 25 miliar	Paket	0,045144

20	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 25 - 50 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 25 - 50 miliar	Paket	0,030800
21	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 50 - 100 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 50 - 100 miliar	Paket	0,021032
22	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 100 - 250 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 100 - 250 miliar	Paket	0,013200
23	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 250 - 500 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 250 - 500 miliar	Paket	0,009680
24	Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana > 500 Miliar	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana > 500 miliar	Paket	0,009680
25	Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 0 - 250 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 0 - 250 juta	Paket	0,251416
26	Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana 250 - 500 Juta	biaya konstruksi fisik bangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana 250 - 500 juta	Paket	0,214984

27	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiTidakSederh ana 500 Juta - 1 Miliar	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasitidaksede rhana 500 juta - 1 miliar	Paket	0,182072
28	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiTidakSederh ana 1 - 2,5 Miliar	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasitidaksede rhana 1 - 2,5 miliar	Paket	0,156024
29	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiTidakSederh ana 2,5 - 5 Miliar	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasitidaksede rhana 2,5 - 5 miliar	Paket	0,131736
30	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiTidakSederh ana 5 - 10 Miliar	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasitidaksede rhana 5 - 10 miliar	Paket	0,092136
31	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiTidakSederh ana 10 - 25 Miliar	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasitidaksede rhana 10 - 25 miliar	Paket	0,064592
32	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiTidakSederh ana 25 - 50 Miliar	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasitidaksede rhana 25 - 50 miliar	Paket	0,043032
33	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiTidakSederh ana 50 - 100 Miliar	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasitidaksede rhana 50 - 100 miliar	Paket	0,028600

34	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiTidakSederh ana 100 - 250 Miliar	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasitidaksede rhana 100 - 250 miliar	Paket	0,017864
35	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiTidakSederh ana 250 - 500 Miliar	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasitidaksede rhana 250 - 500 miliar	Paket	0,011968
36	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiTidakSederh ana > 500 Miliar	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasitidaksede rhana > 500 miliar	Paket	0,011968
37	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiKhusus 0 - 250 Juta	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasikhusus 0 - 250 juta	Paket	0,138512
38	ManajemenKonstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiKhusus 250 - 500 Juta	biayakonstruksifisi kbangunangedung negara klasifikasikhusus 250 - 500 juta	Paket	0,116424

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



**BUPATI BULELENG**  
**PROVINSI BALI**  
**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG**  
**NOMOR 900/727/HK/2022**  
**TENTANG**

**NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN  
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**BUPATI BULELENG,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
  4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
  5. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

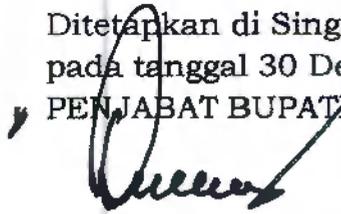
**Menetapkan** :

**KESATU** : Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

07-2

- KEDUA : Nomor Rekening Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan nomor rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2022  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

  
y. KETUT LIHADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas/Badan dan Bagian lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja; dan
5. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Seririt.

Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H  
NIP.: 19810716 200803 1 001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 900/727/HK/2022  
 TENTANG

NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN,  
 BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA  
 PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
 PEMBANTU DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN 2023

NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,  
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH

NO	SKPD	Jabatan Bendahara	Nomor Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06487-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Menangani Kegiatan untuk KPA di Bagian Umum	014.01.05.00382-9	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Menangani Kegiatan untuk KPA di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	014.01.05.00023-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pegeluaran Pembantu Menangani Kegiatan untuk KPA di Bagian Kesejahteraan Rakyat	014.01.05.00012-6	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pegeluaran Pembantu Menangani Kegiatan untuk KPA di Bagian Hukum	014.01.05.00021-7	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pegeluaran Pembantu Menangani Kegiatan untuk KPA di Bagian Perencanaan dan Keuangan	014.01.05.00020-5	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pegeluaran Pembantu Menangani Kegiatan untuk KPA di Bagian Perekonomian dan Pembangunan	014.01.05.00381-7	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pegeluaran Pembantu Menangani Kegiatan untuk KPA di Bagian Organisasi	014.01.05.00011-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pegeluaran Pembantu Menangani Kegiatan untuk KPA di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	014.01.05.00371-4	BPD Bali Cab. Singaraja

NO	SKPD	Jabatan Bendahara	Nomor Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Menangani Kegiatan untuk KPA di Bagian Pemerintahan	014.01.05.00010-2	BPD Bali Cab. Singaraja
2	Sekretariat DPRD	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06485-0	BPD Bali Cab. Singaraja
3	Inspektorat Daerah	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.01099-0	BPD Bali Cab. Singaraja
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.00014-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00639-5	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	014.01.05.00024-3	BPD Bali Cab. Singaraja
5	Dinas Kebudayaan	Bendahara Pengeluaran	014.01.05.00421-9	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00410-8	BPD Bali Cab. Singaraja
6	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06491-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00383-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Tejakula I	014.01.05.00079-8	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Tejakula II	014.01.05.00078-6	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Kubutambahan I	046.01.05.00072-2	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Kubutambahan II	046.01.05.00073-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sawan I	014.01.05.00077-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sawan II	014.01.05.00076-2	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Buleleng I	014-01.05.00071-2	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Buleleng II	014.01.05.00073-6	BPD Bali Cab. Singaraja

M.

NO	SKPD	Jabatan Bendahara	Nomor Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Buleleng III	014.01.05.00072-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sukasada I	014.01.05.00075-1	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sukasada II	014.01.05.00080-3	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Banjar I	015.01.05.00125-2	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Banjar II	015.01.05.00061-2	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Seririt I	015.01.05.00123-8	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Seririt II	015.01.05.00130-5	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Seririt III	015.01.05.00126-4	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Busungbiu I	015.01.05.00127-6	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Busungbiu II	015.01.05.00128-8	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Gerokgak I	015.01.05.00131-7	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Gerokgak II	015.01.05.00129-1	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat	014.01.05.000748	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Tejakula I	014.01.05.00095-6	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Tejakula II	014.01.05.00093-2	BPD Bali Cab. Singaraja

NO	SKPD	Jabatan Bendahara	Nomor Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Kubutambahan I	046.01.05.00074-6	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Kubutambahan II	014.01.05.00099-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Sawan I	014.01.05.00096-8	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Sawan II	014.01.05.00097-1	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Buleleng I	014.01.05.00092-1	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Buleleng II	056.01.05.00039-8	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Buleleng III	014.01.05.00100-3	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Sukasada Sukasada I	014.01.05.00094-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Sukasada II	014.01.05.00102-7	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Banjar I	015-01.05.00138-0	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Banjar II	015.01.05.00142-2	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Seririt I	015.01.05.00140-8	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Seririt II	015.01.05.00136-7	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Seririt III	015.01.05.00141-1	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Busungbiu I	015.01.05.00135-5	BPD Bali Cab. Seririt

NO	SKPD	Jabatan Bendahara	Nomor Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5
7		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Busungbiu II	014.01.05.00098-2	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Gerokgak I	015.01.05.00137-9	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Puskesmas Gerokgak II	015.01.05.00143-4	BPD Bali Cab. Seririt
	Rumah Sakit Umum Daerah Tanguwisia Kelas D	Bendahara Penerimaan Pembantu	015.01.05.00133-9	BPD Bali Cab. Seririt
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	015.01.05001393	BPD Bali Cab. Seririt
	8	Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D	Bendahara Pengeluaran Pembantu	014.01.05.00091-8
Bendahara Penerimaan Pembantu			014.01.05.00049-9	BPD Bali Cab. Singaraja
9	Dinas Tenaga Kerja	Bendahara Pengeluaran	014.01.05.00061-9	BPD Bali Cab. Singaraja
10	Dinas Pariwisata	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.00124-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00354-4	BPD Bali Cab. Singaraja
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.01102-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00335-1	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat	014.01.05.00029-3	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Tata Ruang dan Bina Kontruksi	014.01.05.00031-1	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Bina Marga	014.01.05.000.26-7	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Cipta Karya	014.01.05.00030-8	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Penataan Bangunan	014.01.05.00025-5	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sumber Daya Air	014.01.05.00028-0	BPD Bali Cab. Singaraja

7.

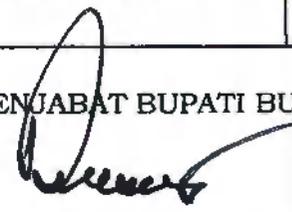
NO	SKPD	Jabatan Bendahara	Nomor Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5
12	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Bendahara Pengeluaran	014.01.05.00652-5	BPD Bali Cab. Singaraja
13	Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06184-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00634-1	BPD Bali Cab. Singaraja
14	Dinas Pertanian	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.00120-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00341-5	BPD Bali Cab. Singaraja
15	Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06548-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00356-8	BPD Bali Cab. Singaraja
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06365-0	BPD Bali Cab. Singaraja
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06341-0	BPD Bali Cab. Singaraja
18	Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06168-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00006-0	BPD Bali Cab. Singaraja
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.01234-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00410-5	BPD Bali Cab. Singaraja
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06306-0	BPD Bali Cab. Singaraja
21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bendahara Pengeluaran	014.01.05.00181-9	BPD Bali Cab. Singaraja
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06143-0	BPD Bali Cab. Singaraja
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Pengeluaran	014.01.05.00193-6	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00355-6	BPD Bali Cab. Singaraja
24	Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran	014.01.05.00191-2	BPD Bali Cab. Singaraja

M.C

NO	SKPD	Jabatan Bendahara	Nomor Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00333-6	BPD Bali Cab. Singaraja
25	Dinas Pemadam Kebakaran	Bendahara Pengeluaran	014.01.05.00642-4	BPD Bali Cab. Singaraja
26	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran	014.01.05.00192-4	BPD Bali Cab. Singaraja
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.00089-0	BPD Bali Cab. Singaraja
28	Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah	Bendahara Pengeluaran	014.01.05.00002-3	BPD Bali Cab. Singaraja
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Bendahara Pengeluaran	014.01.05.00372-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00332-4	BPD Bali Cab. Singaraja
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06215-0	BPD Bali Cab. Singaraja
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran	014.01.05.00331-2	BPD Bali Cab. Singaraja
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.00106-0	BPD Bali Cab. Singaraja
33	Rumah Sakit Umum Daerah	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.01043-0	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Penerimaan	014.01.05.00409-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		Bendahara Umum BLUD	014.01.05.00062-0	BPD Bali Cab. Singaraja
34	Kecamatan Tejakula	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.00117-0	BPD Bali Cab. Singaraja
35	Kecamatan Kubutambahan	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06302-0	BPD Bali Cab. Singaraja
36	Kecamatan Sawan	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.00104-0	BPD Bali Cab. Singaraja
37	Kecamatan Sukasada	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.06486-0	BPD Bali Cab. Singaraja

NO	SKPD	Jabatan Bendahara	Nomor Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5
38	Kecamatan Buleleng	Bendahara Pengeluaran	014.01.00.00115-0	BPD Bali Cab. Singaraja
39	Kecamatan Banjar	Bendahara Pengeluaran	015.01.05.00011-7	BPD Bali Cab. Seririt
40	Kecamatan Seririt	Bendahara Pengeluaran	015.01.00.00068-0	BPD Bali Cab. Seririt
41	Kecamatan Gerokgak	Bendahara Pengeluaran	015.01.00.00070-0	BPD Bali Cab. Seririt
42	Kecamatan Busungbiu	Bendahara Pengeluaran	015.01.05.00002-6	BPD Bali Cab. Seririt

PENJABAT BUPATI BULELENG,

  
 KETUT LIHADNYANA

**Aslinya Sesuai Dengan Aslinya**  
 Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Waringin, S.H  
 NIP. 19810716 200803 1 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 900/727/HK/2022  
 TENTANG  
 NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN,  
 BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,  
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
 PENGELUARAN PEMBANTU DI SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,  
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH

NO	SKPD	KELURAHAN	Nomor Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN BULELENG	LILIGUNDI	014.01.05.00647-6	BPD Bali Cab. Singaraja
		BERATAN	014.01.05.00652-3	BPD Bali Cab. Singaraja
		KAMPUNG SINGARAJA	014.01.05.00644-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		PAKET AGUNG	014.01.05.00640-1	BPD Bali Cab. Singaraja
		BANYUASRI	014.01.05.00636-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		BANJAR TEGAL	014.01.05.00650-1	BPD Bali Cab. Singaraja
		KAMPUNG ANYAR	014.02.15.89815-3	BPD Bali Cab. Singaraja
		KAMPUNG BUGIS	014.01.05.00645-6	BPD Bali Cab. Singaraja
		KAMPUNG KAJANAN	014.01.05.00638-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		KAMPUNG BARU	014.01.05.00003-5	BPD Bali Cab. Singaraja
		BANJAR BALI	014.01.05.00638-6	BPD Bali Cab. Singaraja
		BANJAR JAWA	014.01.05.00637-5	BPD Bali Cab. Singaraja
		ASTINA	014.01.05.00651-2	BPD Bali Cab. Singaraja
		KENDRAN	014.01.05.00649-8	BPD Bali Cab. Singaraja
		BANYUNING	014.01.05.00653-4	BPD Bali Cab. Singaraja
		PENARUKAN	014.01.05.00643-3	BPD Bali Cab. Singaraja
		KALIUNTU	014.01.05.00641-2	BPD Bali Cab. Singaraja
2	KECAMATAN SERIRIT <i>Salinan Sesuai Dengan Aslinya</i>	SERIRIT	014.01.05.00642-3	BPD Bali Cab. Singaraja
3	<i>Kepala Bagian Hukum</i> KECAMATAN SUKASADA	SUKASADA	014.01.05.00645-5	BPD Bali Cab. Singaraja

Made Bayu Waningin, S.H  
 NIP. : 19810716 200803 1 001

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA